

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang pendidikan merupakan suatu sarana bagi seseorang untuk meningkatkan mutu manusia dalam hidup bangsa dan bernegara. Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara, dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam proses pembangunan nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dalam perkembangan masyarakat. Pendidikan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga setiap individu dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektualnya. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang dapat bersaing dengan negara lain.

Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran, salah satu faktornya kinerja yang telah dicapainya. Proses penyusunan anggaran umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sehingga lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat. Kemudian, keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 27 tahun 2013) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, yang akan menggantikan Permendagri nomor 37 tahun 2012.

Terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja itu sendiri, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau pada hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan. Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006;171). Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja mempunyai konsekuensi menitik beratkan pada aspek manajemen strategis dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran untuk optimalisasi *output* yang dihasilkan dari suatu *input* (biaya) tertentu. Penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja harus berdasarkan

pertimbangan beban kerja dan *unit cost* setiap kegiatan karena orientasi tidak hanya pada output saja tetapi juga outcome, sehingga satuan kerja harus menetapkan tujuan yang jelas terlebih dahulu, karena anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan yang dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *value for money*. Menurut Mardiasmo (2004:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas. Elemen yang pertama pada konsep *value for money* yaitu ekonomi. Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Elemen yang kedua dari konsep *value for money* ialah efisiensi. Efisiensi yaitu pencapaian *output* dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Semakin rendah nilai rasio efisiensi yang di peroleh, maka semakin bagus pula kinerja organisasi sektor publik tersebut. Elemen yang terakhir dari konsep *value for money* yaitu efektivitas. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengukuran sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dijalankan, akan tetapi meliputi kemampuan yang

menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* (umpan balik) sehingga terciptanya sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikut baik dalam perencanaan maupun implementasi.

Terkait dengan tujuan pengukuran kinerja, maka perlu diketahui data perkembangan belanja pada subjek penelitian, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah data ringkasan APBD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 1.1
Data Ringkasan Target dan Realisasi Belanja dan program pada APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018

Uraian	tahun 2018		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja langsung urusan program	465.202.403.033	443.769.932.021	95,39
Program peningkatan mutu pendidikan	453.197.478.043	432.504.710.627	95,43
Program manajemen pelayanan pendidikan	1.740.213.182	1.665.704.980	95,72
Program pengembangan dan peningkatan pendidikan luar biasa	10.264.711.808	9.599.516.414	93,52

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan Dinas P&K Provinsi NTT(2018)

Berdasarkan data 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2018 target anggaran belanja urusan program sebesar Rp. 465.202.403.033 dan realisasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 443.769.932.021. Memiliki beberapa program yang mendukung belanja langsung urusan program kinerja Dinas Pendidikan yaitu program peningkatan mutu pendidikan memiliki target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 453.197.478.043, Realisasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 432.504.710.627. Pada program manajemen pelayanan pendidikan target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.740.213.182, Realisasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 1.665.704.980. Pada program pengembangan dan peningkatan pendidikan luar biasa target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.264.711.808, Realisasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 9.599.516.414.

Dari tahun 2018 Anggaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dari pemerintah pusat mengalami penurunan anggaran. khususnya pada belanja dan program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi hasil kinerja belanja dan program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah terlaksanakan dengan baik. Apakah dengan penurunan anggaran tersebut dinas pendidikan dan kebudayaan telah menggunakan anggaran dengan baik yakni ekonomis, efisien dan efektifi ? Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas baik data maupun hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Belanja Daerah Berbasis Konsep *Value for Money* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 di tinjau dengan pendekatan *value for money* yaitu Ekonomis, Efisien, Efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui kinerja Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan *value for money* yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penelitian

Untuk menyelesaikan tugas akhir dan isyarat kelulusan S1 Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan untuk mengetahui kinerja belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Bagi Pembaca

dapat dijadikan sebagai pedoman atau untuk peneliti selanjutnya tentang Pengukuran kinerja belanja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.